

Korupsi di Sumut Struktural dan Sistemik

Dari Halaman 1

berarti turun 35 poin dibanding tahun sebelumnya," ungkap Budi.

Menanggapi hal itu, pengamat anggaran dan kebijakan publik, Elfenda Ananda menegaskan, turunnya skor SPI dan MCSP di Pemprov Sumut semakin menegaskan buruknya tata kelola pemerintahan daerah.

Skor integritas yang merosot dari 66,37 pada 2023 menjadi 58,55 pada 2024, ditambah anjloknya aspek perencanaan hingga 35 poin, menunjukkan bahwa sistem perencanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, serta integritas birokrasi di Sumut berada pada titik darurat.

"Fakta ini menegaskan bahwa korupsi di Sumut bukan lagi sekadar insiden individual seperti OTT Topan Ginting, melainkan sudah bersifat struktural dan sistemik. Ironisnya, kondisi ini terjadi justru di wilayah yang selama ini mendapat pendampingan supervisi langsung dari KPK," ucap Elfenda Ananda, dilansir dari Waspada.id, Selasa (30/9/2025).

Elfenda menyebut, Sumut pada 2024 dipimpin oleh Pj Gubernur Agus Fatoni atas penunjukan Jokowi. Penunjukan ini bukan sekadar administratif, melainkan sarat dugaan aroma KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) demi mengamankan jalur politik Bobby Nasution.

"Lihat saja polanya: pejabat Pj ditempatkan di sejumlah daerah contohnya Langkat dan setelah Bobby berkuasa, sebagian dari mereka justru dipromosikan. Bukankah ini tanda jelas bahwa birokrasi direkayasa untuk kepentingan politik, bukan untuk membangun pemerintahan yang bersih," ujarnya.

Maka jangan heran, kata Elfenda, jika skor

integritas Sumut terus menurun, sebab apa yang dimainkan bukan meritokrasi, melainkan politik transaksional dan patronase kekuasaan. Inilah wajah telanjang birokrasi yang dikorbankan demi ambisi politik.

"KPK memang sering bicara soal pencegahan, tapi masalah di Sumut jauh lebih dalam, birokrasi sudah dikooptasi politik sehingga reformasi integritas hanya jadi hiasan di atas kertas. Selama pejabat strategis dipilih karena loyalitas politik, bukan meritokrasi, MCP dan SPI hanyalah angka palsu untuk laporan," ucapnya.

Lebih parah lagi, lanjut Elfenda, KPK justru terkesan melindungi Bobby Nasution dalam kasus korupsi jalan di Sumut. Berkali-kali desakan agar Bobby diperiksa, bahkan ketika hakim memintanya di persidangan, tidak pernah ditindaklanjuti.

"Ini menunjukkan wajah KPK yang ambigu: keras ke bawah, lunak ke atas. Kalau begini, jangan harap penilaian SPI bisa membaik karena yang rusak bukan sekadar birokrasi, tapi juga keberanian KPK menegakkan hukum tanpa pandang bulu," tandasnya.

Elfenda menambahkan bahwa turunnya SPI dan MCSP harus dibaca sebagai peringatan keras bahwa Sumut tengah terjebak dalam lingkaran patronase politik yang rawan korupsi. OTT Topan Ginting hanyalah puncak gunung es dari tata kelola yang bobrok.

Elfenda mewanti-wanti, jika Pemprov Sumut tidak segera melakukan reformasi birokrasi secara radikal, membuka ruang transparansi, partisipasi publik, dan menghentikan praktik penempatan pejabat titipan politik, maka Sumut hanya akan terperangkap dalam siklus "pencitraan antikorupsi" tanpa substansi.

Dengan kata lain, sebut Elfenda, turunnya

skor integritas merupakan indikator kegagalan kolektif elite politik dan birokrasi dan karena itu masyarakat Sumut harus lebih aktif mengawasi agar janji reformasi tidak berhenti sebatas kata-kata.

Elfenda pun berharap sudah seharusnya Presiden Prabowo/Mendagri melakukan evaluasi apa yang terjadi di Sumut agar menghentikan pola penempatan pejabat titipan politik yang melemahkan integritas birokrasi.

Presiden harus memastikan fit and proper test terbuka dengan melibatkan KASN, akademisi, dan masyarakat sipil untuk posisi strategis (Kadis, Kepala UPT, Pj Bupati/Wali Kota). Dalam melakukan penempatan pejabat harus dengan rekam jejak pejabat yang dipublikasi agar publik bisa mengawasi.

Dalam hal penganggaran untuk perbaikannya, sambung Elfenda, seharusnya seluruh dokumen RKPD, KUA-PPAS, hingga APBD dipublikasikan dalam format terbuka. Dalam kasus pengadaan barang dan jasa publik harus dapat memantau perubahan anggaran dan proyek.

"Publik juga harus tahu manfaat dari setiap proyek yang akan dibangun. Pemprov harus menerapkan praktik e-procurement penuh tanpa ruang negosiasi offline," ungkapnya.

Dalam hal ini, Elfenda kembali menegaskan jangan sampai kasus pergeseran anggaran enam kali dan merupakan akal akalan saja karena pada saat Perubahan APBD tidak dipakai dalam pertimbangan.

"Keberanian Pemprovsumu memutus mata rantai patronase dan praktik titipan, skor SPI/MCSP akan terus merosot dan Sumut tetap jadi lahan subur korupsi," ungkap peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara ini. (wid/js)

80% Timah Indonesia Diseludupkan

Dari Halaman 1

produksi 45 ribu ton yang diseludupkan mencapai 36 ribu ton --suatu angka fantastis.

Timah menjadi bahan baku penting untuk banyak produk hilir, terutama: solder; lapisan pelindung (tin plate) untuk kaleng makanan; komponen baterai kendaraan listrik; dan juga industri kimia seperti: keramik dan katalis; serta aplikasi dalam elektronika dan teknologi energi baru seperti sel surya.

MERAMPOK

Presiden pun menyebut ada upaya sistematis merampok kekayaan alam Indonesia dengan memanfaatkan kelemahan peraturan dan sistem yang ada.

"Sebagai contoh di Bangka Belitung yang untuk cukup lama menjadi pusat tambang timah terkemuka di dunia itu, terdapat 1.000 tambang ilegal, 1.000 tambang ilegal," ujar Prabowo pada penutupan Munas ke-6 PKS di Jakarta, Senin (29/9).

OPSGAB

"Mulai tanggal 1 September kemarin saya perintahkan TNI, Polri, Bea Cukai bikin Opsgab (operasi gabungan) besar-besaran di Bangka Belitung. (Targetnya untuk) menutup yang selama ini hampir 80% hasil timah, tiap tahun, diseludupkan. Tiap tahun 80% timah kita. Tutup!" tegasnya.

Upaya penyeludupan timah dilakukan lewat jalur laut, memanfaatkan berbagai jenis kapal, mulai dari yang berukuran kecil hingga kapal ferry.

Presiden mengklaim, melalui Opsgab TNI, Polri dan Bea Cukai saat ini, sampan kecil saja pun sudah tidak bisa lagi menyeludupkan timah.

AMANKAN UANG NEGARA Rp67 TRILIUN

Lewat operasi besar-besaran yang kini sudah berjalan, presiden menargetkan Rp22 triliun kerugian negara bisa diselamatkan hingga akhir Desember 2025.

Sementara untuk tahun 2026, pengamanan penyeludupan timah ditarget bisa menyelamatkan Rp45 triliun uang negara.

Sehingga, secara total diperkirakan Rp67 triliun potensi kerugian negara bisa diselamatkan dari pemberantasan penyeludupan timah.

"Kita perkirakan September, Oktober, November, Desember kita bisa selamatkan Rp22 triliun. Tahun depan kita perkirakan kita bisa selamatkan Rp45 triliun. (Ini baru) dari dua pulau ini saja (Bangka dan Belitung)," jelas Prabowo.

LIMBAH NIKEL

Namun, Kepala Negara juga mengingatkan masih limbah nikel berupa mineral tanah jarang (rare earth) yang punya nilai ekonomi tinggi, juga masih berpotensi diseludupkan.

Sehingga, presiden memerintahkan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan merekrut ahli-ahli kimia untuk mengantisipasi penyeludupan rare earth.

"Supaya neceek. Dia (orang awam) lihat pasir. Padahal ini pasirmnya nilainya luar (biasa)," kata Prabowo.

KELUHAN PT TIMAH

Sebelumnya, Direut PT Timah Tbk, Restu Widiantoro, sempat mengeluhkan soal aktivitas tambang ilegal saat rapat dengan Komisi VI DPR pada Senin (22/9/2025).

Wisnu mengatakan, selama ini perusahaannya selalu kalah dengan aktivitas penambangan timah ilegal di Babel.

Pada PT Timah mendapat tugas dari negara untuk melakukan proses bisnis secara legal. Restu juga mengungkap, sampai saat ini persaingan antara penambangan timah legal dan ilegal di Babel terus, ketat.

"Kami menyadari selama ini di Bangka Belitung itu bersaing bebas atau head to head antara yang legal dengan yang ilegal. Itu berhadapan-hadapan langsung di lapangan di wilayah Bangka Belitung antara yang legal dengan yang ilegal," ujar Restu.

"Kenapa kalah? Karena yang ilegal namanya ilegal tidak pernah membayar pajak, tidak pernah membayar royalti dan sebagainya. Tetapi kami selalu pada posisi kalah karena royalti harus dibayar, kemudian pajak, jasa reklamasi juga harus dibayar sehingga secara bersaing bebas di lapangan di Bangka Belitung kami tidak bisa bersaing," jelasnya.

Dalam persaingan harga hasil tambang timah pun PT Timah kalah karena oknum ilegal sudah terlebih dahulu mematok harga lebih tinggi.

"Setiap PT Timah menaikkan harga, misalnya Rp250.000 per kilogram, pihak lawan sudah naik jauh lebih besar sehingga kalah terus," lanjut Restu.

Karena terus rugi akibat oknum ilegal, PT Timah saat ini diperkuat dengan Satuan Tugas (Satgas) internal yang bertugas membantu perusahaan memperbaiki situasi pada kawasan yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

Restu bilang, Satgas Internal punya dua tugas utama. Pertama, melakukan pemagaran wilayah Babel supaya tidak bisa dimasuki kegiatan tambang ilegal.

Kedua, Satgas Internal juga bertugas menertibkan tambang timah ilegal.

"Bahwa penambangan ilegal selama ini disebut ilegal karena tidak melalui proses-proses yang legal. Sudah sejak awal kami laporkan kepada dewan bahwa kami akan mengorganisir semua yang sebelumnya dinyatakan ilegal menjadi legal dengan dua cara," ungkap Restu. (kps/cp/js)

Dosen Hukum Unimal: Tindakan Bobby

Dari Halaman 1

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, gubernur hanya berwenang menjalankan urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang.

"Nah, menghentikan kendaraan bermotor di jalan raya adalah kewenangan Polri, bukan kewenangan gubernur," tegas Muksalmina.

Ia menambahkan, kewenangan Polri telah diatur jelas dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 dan Pasal 260 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan demikian, tindakan Bobby dapat dikategorikan sebagai ultra vires, yakni melampaui kewenangan hukum.

Lebih lanjut, Muksalmina menjelaskan bahwa

dalih Bobby terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga tidak berdasar.

Berdasarkan Pasal 4 dan 5 UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 2022, PKB dikenakan berdasarkan domisili pemilik kendaraan.

Artinya, kendaraan berpelat BL tetap sah membayar pajak di Aceh, bukan di Sumut.

"Memaksa pemilik kendaraan mengganti pelat atau membayar pajak di Sumut sama saja dengan perbuatan melawan hukum.

Bahkan, bila ditarik ke ranah pidana, tindakan tersebut berpotensi melanggar Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang dan Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan orang lain," ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah pusat melalui Men-

teri Dalam Negeri wajib mengambil langkah tegas.

Negara tidak boleh membiarkan praktik-praktik yang menciptakan diskriminasi antarwarga negara dan memperlakukan Aceh seolah-olah wilayah asing.

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa NKRI adalah satu kesatuan (Pasal 1 ayat (1) UUD 1945), sehingga segala bentuk kebijakan yang mengarah pada pemisahan identitas wilayah harus segera dihentikan.

Tindakan tegas dari pemerintah pusat penting bukan hanya untuk menegaskan hukum, tetapi juga untuk menjaga keutuhan bangsa, mencegah lahirnya konflik horizontal, dan memastikan bahwa seluruh warga negara, tanpa terkecuali, mendapat perlakuan adil sesuai prinsip negara hukum. (tr/js)

MK Tolak Gugatan

Dari Halaman 1

alternatif.

MK telah mencermati secara saksama ihwal permohonan a quo, in casu pada bagian alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum).

Menurut MK, tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian yaitu terkait dengan meniadakan kata "agama dan kepercayaan" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan

sebagaimana yang telah dimaknai oleh MK dalam putusan nomor: 97/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2017 dengan Pasal yang dijadikan dasar pengujian, yaitu Pasal 281 ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan data agama harus didesain sebagai kolom isian terbuka mengikuti kaidah statistika yang baik agar dapat berdaya guna bagi keperluan pembangunan dan sebagainya, menurut MK, Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi hukum yang jelas dan memadai mengenai pertentangan antara sistem

pencatatan data agama yang terdapat saat ini dengan norma dalam UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian.

Terlebih lagi, pemohon disebut juga tidak menjelaskan hubungan dan keterkaitan antara menghapus kata "agama dan kepercayaan" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dengan pencatatan agama dalam data kependudukan harus dilakukan secara terbuka.

Namun, kemudian dalam petitum, pemohon memohon agar pencatatan data kependudukan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip statistika yang bersifat isian terbuka. (cnni/js)

Di Medan, Siapa yang Tertawa

Dari Halaman 1

Pemerintah seolah tak kuasa. Dinas perizinan bungkam, dinas tata ruang pura-pura buta. DPRD yang mestinya mengawasi malah ikut main. Rapat-rapat dengar pendapat sering hanya jadi panggung gertak. Habis rapat, sunyi. Gedung tetap berdiri, rakyat tetap jadi penonton.

Di saat rakyat bayar pajak bumi dan bangunan tiap tahun, pengembang besar bisa bermain dengan izin. Mestinya ada PAD miliaran rupiah,

tapi yang masuk ke kas daerah sering hanya receh. Selebihnya menguap entah ke mana. Di warung kopi orang-orang sudah berbisik, "itu proyek siapa, itu jatah siapa." Dan bisik-bisik itu lebih nyaring daripada berita resmi.

Yang paling sakit hati adalah rakyat kecil. Mereka bikin rumah kecil saja, ditagih PGB (dulu Namanya IMB). Dipusingkan dengan syarat macam-macam. Tapi pengembang besar bisa berdiri puluhan lantai tanpa jelas izinnnya. Ketidakadilan itu telanjang di depan mata.

Islam mengingatkan, setiap rupiah yang

dimakan dengan cara haram akan jadi bara di neraka. Rasullullah SAW menegaskan, daging yang tumbur dari yang haram, neraka lebih pantas baginya. Kalau PAD yang mestinya untuk rakyat malah jadi bancakan, tidakkah itu berarti memakan hak rakyat?

Maka pertanyaan yang harus dijawab, Siapa sebenarnya yang diuntungkan? Rakyat jelas bukan. Negara juga rugi. Yang tertawa hanya segelintir orang. Dan tawa itu tertawa sangat pahit di telinga rakyat kecil yang terus mengais harapan.

Purbaya Sentil Bahlil

Dari Halaman 1

itu terjadi karena pertumbuhan ekonomi di tanah air belum begitu cepat.

Oleh karena itu, Purbaya setuju dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto menerbangkan ekonomi Indonesia ke 8 persen. Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi yang tak bagus akan berdampak besar terhadap kelompok masyarakat paling bawah.

"Dikeluarkanlah itu subsidi supaya mereka bisa hidup terus dan agak sejahtera ke depan. Kunci utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi, kita mencoba meningkatkan kesejahteraan semuanya sehingga mereka semua kuat. Pada suatu titik, enggak harus subsidi lagi," tuturnya.

"Walaupun susah mungkin ke 8 persen, tapi selama kita bergerak ke arah sana, bukan ke arah bawah seperti sebelumnya, harusnya cita-cita kita lama-lama akan tercapai juga," imbuh Purbaya.

Purbaya melaporkan pagu subsidi dan kompensasi untuk 2025 adalah Rp498,8 triliun. Realisasinya per Agustus 2025 tembus Rp218 triliun atau setara 43,7 persen.

Ia menekankan tidak semua masyarakat Indonesia bisa menikmati kue perekonomian secara merata. Oleh karena itu, subsidi akan tetap berjalan.

"Jadi, subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka juga bisa menikmati kue ekonomi kita yang sedang berkembang," tandas Purbaya. (cnni/js)

Wartawan Dicekik Saat

Dari Halaman 1

motornya sambil videoan cara bapak ini mengusir yang diduga sudah marah," ujarnya.

Saat menunggu di luar, Munir melihat ada mobil SPPG Gedong 2 datang. Ia kemudian mengambil video dan langsung dilarang oleh pelaku.

"Saya bilang, ini di luar area publik enggak bisa larang-larang. Terus salah satu pegawai SPPG samperin saya ngejelasin bahwa bukan di situ penyedia MBG yang sebabkan siswa keracunan tapi di pinggir jalan dekat samping air biru," tutur Munir.

Mendapat informasi itu, Munir dan Kiki pun langsung berencana menuju ke SPPG Gedong 1. Namun, tiba-tiba pelaku langsung mendatangi Munir dan mengecek.

"Tiba-tiba bapak yang tadi sudah kepalkan tangannya mau pukul saya, terus tiba-tiba malah cekik saya dan Kiki. Pegawai SPPG lain langsung memisahkan dan si bapak keamanan tadi dipegangin oleh rekan-rekannya," kata dia.

Terpisah, Kapolsek Pasar Rebo AKP I Wayan Wijaya membenarkan insiden itu. Kata dia, korban sudah datang ke Polsek untuk membuat laporan.

"Ini barusan merapat ke polsek buat laporan, sudah diantar untuk visum. Laporan kita tindak lanjuti," ucap Wayan.

Sebelumnya, sebanyak 20 siswa SDN 01 Gedong Jalan Trikora, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur diduga keracunan MBG, Selasa (30/9). (cnni/js)



Plat BL dan Pelajaran Komunikasi Publik

Dari Halaman 1

dan Sumut yang sudah terjalin erat selama puluhan tahun. Masyarakat Aceh merasa seperti sedang "diusir" dari Medan, padahal mobilitas lintas provinsi adalah hal lumrah, apalagi banyak mahasiswa, pekerja, dan pedagang Aceh yang beraktivitas di Medan.

Pemerintah Provinsi Sumut kemudian memberikan klarifikasi. Disebutkan bahwa yang dilakukan di lapangan bukan razia, melainkan sekadar sosialisasi agar kendaraan berplat BL yang sudah menetap di Sumut melakukan balik nama menjadi plat BK, sesuai ketentuan registrasi kendaraan bermotor. Dengan kata lain, tidak ada larangan kendaraan Aceh masuk Medan.

Meski demikian, kasus ini menyisakan persoalan penting. Bukan semata soal aturan administrasi kendaraan, tetapi tentang bagaimana komunikasi publik dikelola. Informasi yang disampaikan tidak utuh, tidak jelas, dan menimbulkan multitafsir. Inilah yang kemudian memicu gejolak opini publik, bahkan berpotensi memanasakan hubungan sosial di tingkat akar rumput.

Pada hal ini, aturan mengenai balik nama kendaraan sebenarnya sederhana. Jika seseorang pindah domisili atau menetap dalam jangka panjang di provinsi lain, maka kendaraan wajib diregistrasi ulang sesuai domisili baru. Tujuannya agar pembayaran pajak kendaraan masuk ke daerah yang menjadi tempat kendaraan itu beroperasi sehari-hari. Namun, aturan ini tidak pernah dimaksudkan untuk membatasi lalu lintas kendaraan antarprovinsi.

Masalah muncul ketika sosialisasi aturan itu dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Menempelkan stiker "ganti plat jadi BK" di jalanan tanpa penjelasan memadai justru menimbulkan kesan seolah ada kebijakan diskriminatif. Dalam era keterbukaan informasi, kesalahan komunikasi publik seperti ini dapat dengan cepat menyulut salah paham dan menimbulkan sentimen negatif.

Kasus ini menjadi pelajaran berharga bahwa komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga mengelola persepsi. Sebuah kebijakan yang secara substansi benar bisa berubah menjadi kontroversi jika disampaikan dengan cara yang keliru. Dalam hal ini, Pemprov Sumut seharusnya lebih dulu menyiapkan penjelasan resmi, konferensi pers, atau materi sosialisasi yang informatif, bukan membiarkan kesalahan-pemahaman berkembang di ruang publik digital.

Lebih jauh, isu plat BL ini juga menyentuh aspek sosial-budaya. Aceh dan Sumut memiliki kedekatan sejarah, agama, dan perdagangan. Banyak orang Aceh berdagang kopi, rempah, hingga hasil bumi ke Medan. Sebaliknya, banyak warga Sumut yang berkunjung ke Aceh untuk pariwisata maupun urusan bisnis. Hubungan dua daerah ini seharusnya dirawat dengan komunikasi yang saling menghargai, bukan justru dirusak oleh miskomunikasi yang menimbulkan rasa tersinggung.

Karena itu, ke depan, pemerintah daerah harus belajar lebih cermat dalam mengelola komunikasi kebijakan publik. Transparansi, konsistensi, dan empati menjadi kunci. Setiap pesan yang disampaikan harus memperhatikan konteks sosial, psikologis, dan budaya masyarakat. Jangan sampai kebijakan administratif yang sederhana justru dipersiapkan sebagai sikap eksklusif, diskriminatif, atau bahkan anti terhadap kelompok tertentu.

Peristiwa plat BL ini seharusnya tidak berhenti pada klarifikasi semata. Harus ada evaluasi serius agar pola komunikasi publik lebih tertata. Jika tidak, kita berisiko mengulang kembali kesalahpahaman serupa di masa depan.

Komunikasi publik yang baik bukan hanya soal menyampaikan aturan, melainkan juga membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Pada akhirnya, pelajaran paling penting dari kisruh plat BL ini adalah bahwa kata-kata yang tidak tepat bisa meruntuhkan jembatan kepercayaan yang telah lama dibangun antar daerah.